



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasannya Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ini dapat terselesaikan. Renstra ini disusun sebagai gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun. Selesainya Renstra ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada

1. Yth. Bupati Mojokerto
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto,
3. Pihak-pihak lain yang ikut membantu penyusunan Review Renstra ini, yang nama-namanya tidak dapat disebut satu persatu.

Kami menyadari bahwa dalam Review Renstra ini masih ada kekurangan baik sistematika maupun isinya. Oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak, akan kami jadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan Renstra yang akan datang. Namun demikian, kami berharap bahwa renstra ini ada guna dan manfaatnya utamanya bagi yang membutuhkan.

Mojokerto, September 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto



Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H

Pembina Utama Muda
NIP. 19671020 198903 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO	9
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.1.1. Tugas Pokok Fungsi.....	9
2.1.2. Susunan dan Struktur Organisasi.....	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur	13
2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja	13
2.3. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	15
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	22
2.4.1. Tantangan	22
2.4.2. Peluang	22
2.5. Program-Program Strategis.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO.....	24
3.1. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi.....	27
3.2.1. Faktor Pendorong	27
3.2.2. Faktor Penghambat	27
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS).....	28
3.4. Isu-isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO	30
4.1. Tujuan dan Sasaran	30



4.1.1. Tujuan.....	30
4.1.2. Sasaran	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	34
5.1.1. Strategi.....	34
5.1.2. Kebijakan	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2016- 2021 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta



program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2026.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup OPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salahsatu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi pada hasil yang



ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 ini meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Peubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMD tahun 2004-2009;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara erencanaan ,Pengendalian dan ealuasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Pnjang Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daearah;
32. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026;



37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 ini adalah:

1. Menjabarkan isi RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 menjadi rencana instansi yang lebih operasional;
2. Menjabarkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk mencapai keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktifitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 menggunakan sistematika sebagai berikut:



BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas dan fungsi tentang RENSTRA OPD, proses penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah, keterkaitan antara RENSTRA Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

Menguraikan tugas pokok dan fungsi organisasi, susunan dan struktur organisasi, sumberdaya organisasi, kinerja pelayanan, capaian program prioritas yang telah dihasilkan.

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.4. Kendala Dan Hambatan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.5. Program-Program Strategis

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO



Memuat tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi dan program kepala dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan renstra, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

3.1. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.3. Isu-isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN, MEMUAT TENTANG TUJUAN DAN SASARAN

Merumuskan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selama kurun waktu 2016 – 2021.

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan , indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

memuat indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang .

BAB VIII: PENUTUP

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021–2026, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja OPD.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MOJOKERTO

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok Fungsi

Tugas pokok dan fungsi personil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sekretariat mempunyai tugas tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
3. Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi



identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

5. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
 - f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
 - g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.
7. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
 - f. Pelaksanaan pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil;



- g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi.
9. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:
- a. perumusan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektor dalam pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian



- data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
10. Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan.
11. Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan perencanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Perumusan bahan kebijakan teknis kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
 - f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.



2.1.2. Susunan dan Struktur Organisasi

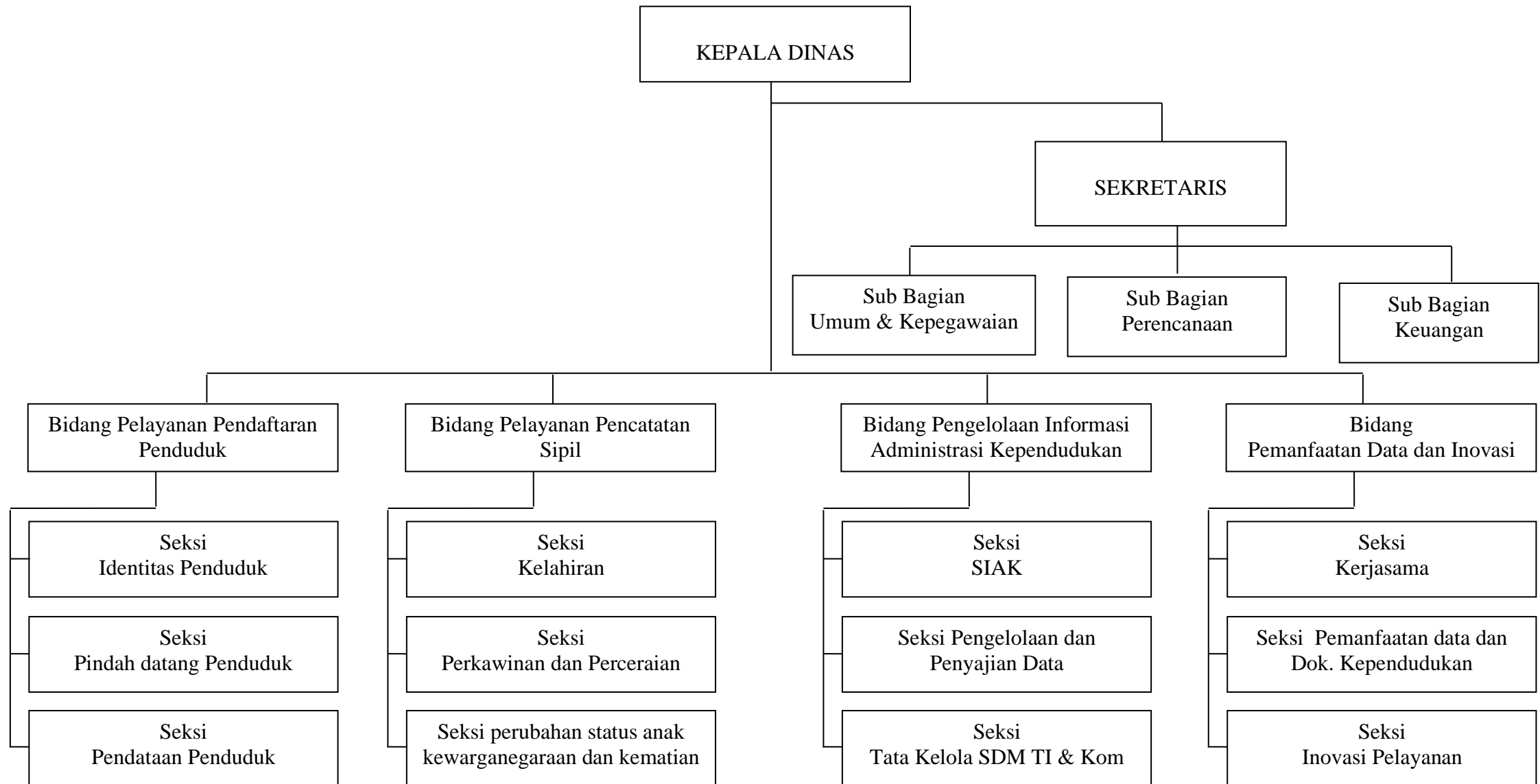
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016, yaitu:

1. Satu orang Kepala Dinas
2. Satu orang Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2) Sub Bagian Perencanaan, dan (3) sub Bagian Keuangan.
3. Empat orang Kepala Bidang, yaitu (1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, (2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, (3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan (4) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
5. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 seksi yaitu:
 - Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penduduk membawahi Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, dan Seksi Pendataan Penduduk.
 - Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mempunyai Seksi Kelahiran, seksi Perkawinan dan Perceraian dan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi: Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Seksi Tata Kelola dan Sumber daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
 - Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi: Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan dan Seksi Inovasi Pelayanan.
6. Kelompok jabatan fungsional.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto seperti gambar berikut.



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 61 orang. Ditinjau dari status kepegawaian, sumber daya manusia tersebut diuraikan sebagai berikut.

- PNS : 38 orang (20 laki-laki; 18 perempuan)
- Tenaga Harian Lepas : 23 orang (9 laki-laki; 14 perempuan)

Ditinjau dari golongan, sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan berikut.

- Golongan IV : 7 orang (5 laki-laki ; 2 perempuan)
- Golongan III : 23 orang (10 laki-laki; 13 perempuan)
- Golongan II : 8 orang (5 laki-laki ; 3 perempuan)

Sisanya sejumlah 23 orang merupakan THL (9 laki-laki; 14 perempuan)

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana penunjang pembangunan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto meliputi:

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	1702 m ²	
2	Kantor	1 unit	
3	Gedung	5 unit	
4	Kendaraan Roda 4 (Empat)	4 Unit	
5	Kendaraan Roda 2 (Dua)	7 unit	
6	Alat studio dan komunikasi: - Telephone - LCD dan Papan Visual	2 set 1 set	
7	Alat Tulis Kantor (ATK): - Komputer - Printer - Note Book	35 unit 25 unit 12 unit	16 unit RB 14 unit RB 1 unit RB



No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
8	Jaringan Tower	19 unit	
9	Meja eselon	16 unit	1 unit RB
10	Meja eselon II	1 unit	
11	Meja Tulis	6 unit	
12	Meja Rapat	2 unit	2 unit RB
13	Kursi Kayu	13	
14	Kursi Lipat	77	16 unit
15	Almari Kayu	2	
16	Kursi Besi	8	
17	Papan Struktur	5	
18	Almari Besi	3	1 unit RB
19	Filling Kabinet	9	
20	Meja Komputer	11	5 unit RB
21	Gordin	5 unit	
22	Kursi tunggu	6	2 unit RB
23	Kursi Putar	21	2 unit RB
24	Mesin Ketik	1	
25	Meja Pelayanan	2	2 unit RB
26	Meja Locket	1	1 unit RB
27	Radio Tape	1	1 unit RB
28	Kipas Angin	3	3 unit RB
29	AC	6	
30	Kursi Tamu	1 set	
31	Lemari Server	1	
32	Rak Kayu	5	
33	Genset	2	
34	Brangkas	1	1 unit RB
35	Roll Opect/ Rak Besi	7	
36	Penyedot Debu	1	1 unit KB
37	Meja tamu	1 set	
38	Fax	1 set	
39	Meja rapat	2	2 unit RB
40	Meja Kursi Sidang Pernikahan	1 unit	

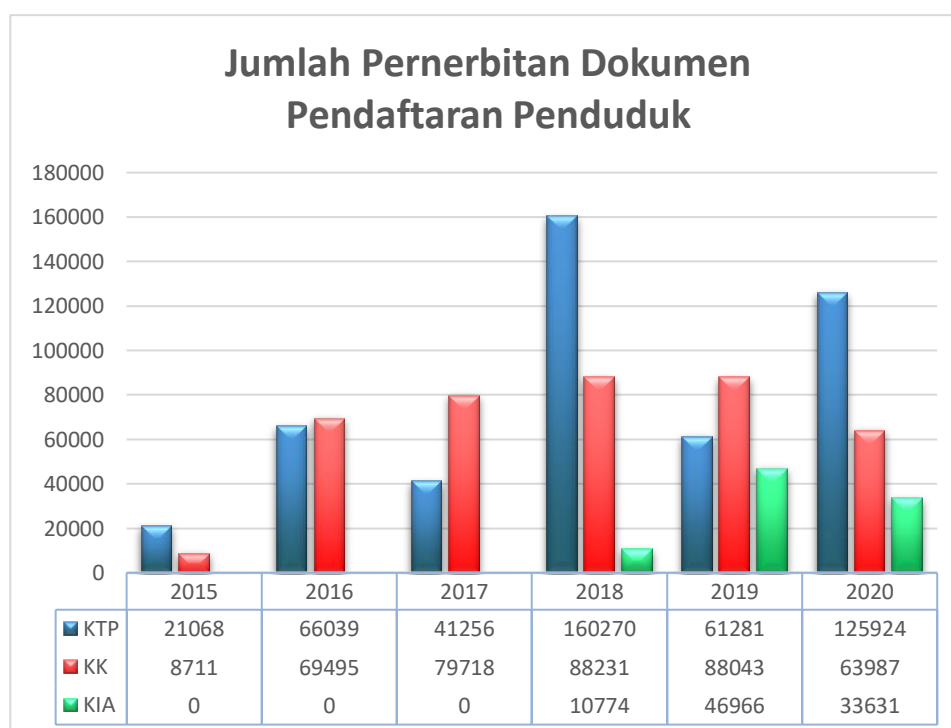


2.3. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

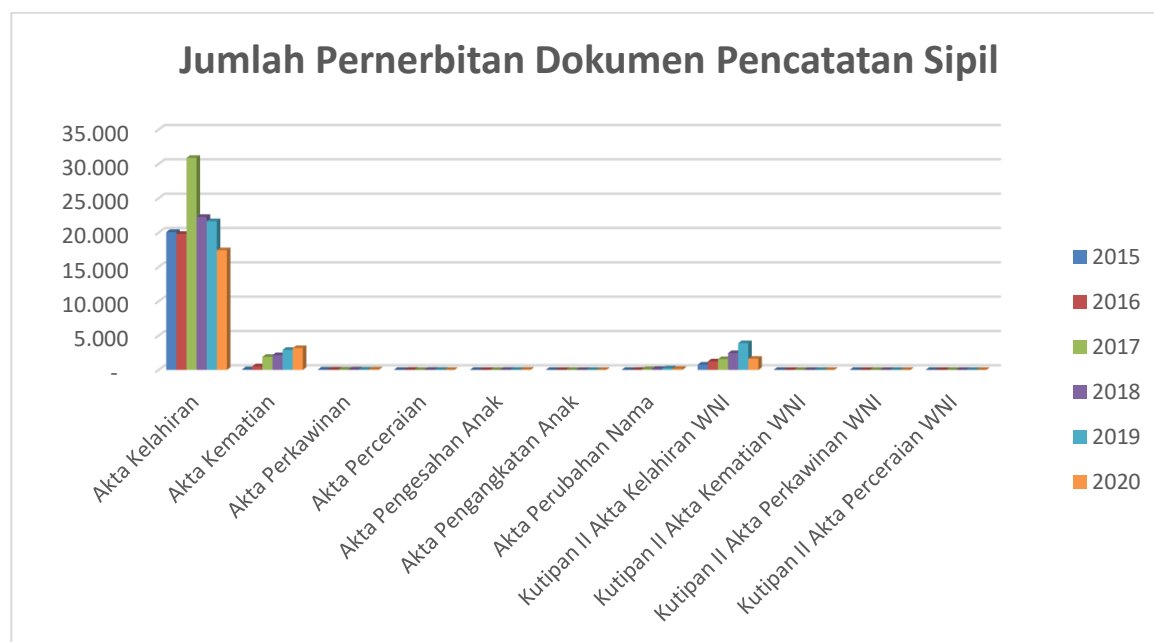
Gambaran kinerja secara umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada pelaksanaan Renstra 2021-2026 sebagaimana tabel berikut.

No	Unit Kerja	Pencapaian Kinerja (%)
1	Sekretariat	100%
2	Bidang Informasi Kependudukan	100%
3	Bidang Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	100%
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	100%
5	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	100%

Pelayanan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk tahun 2015-2020:



Pelayanan penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil tahun 2015-2020:



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Akta Kelahiran	20,084	19,807	30,877	22,280	21,652	17,429
Akta Kematian	84	529	1,901	2,152	2,928	3,183
Akta Perkawinan	60	54	57	76	63	71
Akta Perceraian	9	13	7	13	19	7
Akta Pengesahan Anak	-	-	7	16	13	41
Akta Pengangkatan Anak	8	9	5	8	10	10
Akta Perubahan Nama	11	17	107	143	235	154
Kutipan II Akta Kelahiran WNI	775	1,242	1,568	2,452	3,895	1,625
Kutipan II Akta Kematian WNI	-	-	-	-	4	2
Kutipan II Akta Perkawinan WNI	5	3	3	1	3	-
Kutipan II Akta Perceraian WNI	-	1	1	-	1	-

Tabel T-C.23

PENCAPAIN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aplikasi Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD)	kecamatan	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	%	68.17%	69.21%	75.10%	75.14%	74.27%	75.36%
Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran	%	98.90%	98.90%	98.98%	99.13%	99.34%	99.55%
Kepemilikan KTP	%	92.53%	98.12%	99.29%	99.94%	98.80%	99.58%
	orang	752,971	812,562	824,013	851,936	861,241	882,352
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	jiwa	752,971	812,562	842,874	846,234	861,241	882,352
Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	orang	277	292	334	361	384	398
Persentase Penduduk Wajib KK yang Memiliki KK	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Uraian Kegiatan dan Program	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	848,733,350	698,057,895	706,100,000	710,939,350	965,839,600	-	777,748,276	616,690,131	654,297,011	663,390,781	730,468,688	-									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,847,000	113,847,000	137,000,000	117,000,000	119,000,000	-	91,716,672	76,385,152	96,025,261	83,093,141	97,912,436	-	80.56%	67.09%	70.09%	71.02%	82.28%	0.00%	445,132,662	371.05%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,400,000	8,000,000	10,000,000	10,000,000	9,000,000	-	3,926,600	5,730,700	6,847,900	7,000,000	6,309,900	-	61.35%	71.63%	68.48%	70.00%	70.11%	0.00%	29,815,100	341.58%	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	294,936,150	181,527,895	110,000,000	110,949,750	64,800,000	-	274,927,404	171,615,450	109,530,360	111,210,080	64,427,500	-	93.22%	94.54%	99.57%	100.23%	99.43%	0.00%	731,710,794	486.99%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60,491,000	57,433,000	62,500,000	62,500,000	17,800,000	-	57,564,000	54,175,000	61,900,000	60,625,000	17,375,000	-	95.16%	94.33%	99.04%	97.00%	97.61%	0.00%	251,639,000	483.14%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170,771,600	100,000,000	120,000,000	110,000,000	194,900,000	-	167,733,650	86,693,829	116,278,490	102,000,000	192,246,600	-	98.22%	86.69%	96.90%	92.73%	98.64%	0.00%	664,952,519	473.18%	
Penyediaan Makanan dan Minuman	19,412,600	20,650,000	20,000,000	21,000,000	11,300,000	-	19,250,000	18,250,000	19,850,000	20,650,000	11,300,000	-	99.16%	88.38%	99.25%	98.33%	100.00%	0.00%	89,300,000	485.12%	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	41,275,000	55,000,000	45,000,000	59,400,000	29,350,000	-	41,230,000	54,740,000	44,915,000	59,500,000	28,950,000	-	99.89%	99.53%	99.81%	100.17%	98.64%	0.00%	229,335,000	498.03%	
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	141,600,000	161,600,000	201,600,000	220,089,600	220,089,600	-	121,400,000	149,100,000	198,950,000	219,312,560	208,664,328	-	85.73%	92.26%	98.69%	99.65%	94.81%	0.00%	897,426,888	471.14%	
Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	-	-	-	-	299,600,000	-	-	-	-	-	103,282,924	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.47%	0.00%	103,282,924	34.47%	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	243,047,700	386,957,000	388,000,000	450,527,500	1,351,650,000	-	236,308,667	370,775,404	379,565,058	440,390,979	1,319,482,123	-	-	-	98	-	97.62%	0.00%	1,427,040,108	97.83	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	61,575,000	92,350,000	55,000,000	55,000,000	-	-	58,180,000	82,116,000	51,720,000	52,770,000	-	-	94.49%	88.92%	94.04%	95.95%	0.00%	0.00%	244,786,000	373.39%	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	58,938,200	37,932,500	40,000,000	50,000,000	49,500,000	-	58,072,350	37,932,000	37,999,000	49,925,690	48,724,725	-	98.53%	100.00%	95.00%	99.85%	98.43%	0.00%	232,653,765	491.81%	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26,907,000	31,907,000	30,000,000	42,000,000	25,650,000	-	26,906,317	30,612,404	29,913,758	41,952,789	25,645,321	-	100.00%	95.94%	99.71%	99.89%	99.98%	0.00%	155,030,389	495.52%	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	31,027,500	41,027,500	33,000,000	33,527,500	32,500,000	-	31,025,000	40,800,000	33,000,000	33,527,500	29,499,655	-	99.99%	99.45%	100.00%	100.00%	90.77%	0.00%	167,852,155	490.21%	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	64,600,000	183,740,000	230,000,000	270,000,000	244,000,000	-	62,125,000	179,315,000	226,932,300	262,215,000	241,762,422	-	96.17%	97.59%	98.67%	97.12%	99.08%	0.00%	972,349,722	488.63%	
Pengadaan ADM dan Mobil Pelayanan Keliling	-	-	-	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	973,850,000	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.39%	0.00%	973,850,000	97.39%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22,900,000	10,000,000	55,000,000	55,000,000	15,350,000	-	22,900,000	10,000,000	27,560,000	59,480,000	15,250,000	-	100	100	50	108	99.35%	0.00%	119,940,000	358.25	
Penyusunan rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	22,900,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	22,900,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	42,900,000	300.00%	
Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	10,000,000	-	5,350,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	5,250,000	-	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	98.13%	0.00%	25,250,000	198.13%	
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	-	45,000,000	45,000,000	10,000,000	-	-	-	17,560,000	39,480,000	10,000,000	-	0.00%	0.00%	39.02%	87.73%	100.00%	0.00%	67,040,000	226.76%	
Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00%	
Program peningkatan disiplin aparatur	34,120,000	-	11,820,000	30,350,000	-	-	34,120,000	-	11,370,000	29,900,000	-	-									
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	11,820,000	30,350,000	-	-	-	-	11,370,000	29,900,000	-	-	0.00%	0.00%	96.19%	98.52%	0.00%	0.00%	41,270,000	194.71%	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	34,120,000	-	-	-	-	-	34,120,000	-	-	-	-	-	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34,120,000	100.00%	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	853,000,000	3,029,756,000	6,805,186,666	4,355,464,000	-	-	824,545,061	2,788,680,094	4,413,037,031	4,049,956,891	-	-									
Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	-	-	400,000,000	90,000,000	-	-	-	-	390,643,433	72,435,601	-	-	0.00%	0.00%	97.66%	80.48%	0.00%	0.00%	463,079,034	178.14%	
Operasional Penunjang Pelaksanaan Penerapan KTP-el	350,000,000	226,000,000	3,295,000,000	461,500,000	-	-	348,356,347	218,680,000	1,145,022,817	443,963,000	-	-	99.53%	96.76%	34.75%	96.20%	0.00%	0.00%	2,156,022,164	327.24%	
Gratis pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	99,964,000	99,975,000	98,900,000	-	-	-	99.96%	99.98%	98.90%	0.00%	0.00%	0.00%	298,839,000	298.84%	
Layanan Administrasi Kependudukan Keliling	103,000,000	102,500,000	100,000,000	-	-	-	80,611,544	99,487,584	92,537,840	-	-	-	78.26%	97.06%	92.54%	0.00%	0.00%	0.00%	272,636,968	267.86%	
Pemeliharaan dan Operasional SIAK secara terpadu	300,000,000	-	-	-	-	-	295,613,170	-	-	-	-	-	98.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	295,613,170	98.54%	
Pembangunan dan Operasional SIAK secara terpadu	-	514,658,908	565,807,000	626,068,000	-	-	-	441,328,176	500,306,000	603,104,715	-	-	0.00%	85.75%	88.42%	96.33%	0.00%	0.00%	1,544,738,891	270.51%	
Gratis Pengurusan KTP dan KK	-	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	84,600,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	94.00%	0.00%	0.00%	84,600,000	94.00%	
Pelayanan KTP dan KK Keliling	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	43,080,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	95.73%	0.00%	0.00%	43,080,000	95.73%	
Gratis Pengurusan Akta Pencatatan Sipil	-	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	89,600,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	99.56%	0.00%	0.00%	89,600,000	99.56%	
Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Keliling	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	43,089,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	95.75%	0.00%	0.00%	43,089,000	95.75%	
Pengadaan Blangko KIA	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	368,289,600	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	73.66%	0.00%	0.00%	368,289,600	73.66%	
Pembangunan Ruang Laktasi dan Toilet	-	70,841,092	-	-	-	-	-	70,291,000	-	-	-	-	0.00%	99.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70,291,000	99.22%	
Penunjang DAK Non Fisik	-	14,850,000	181,967,000	-	-	-	-	9,750,000	202,437,591	-	-	-	0.00%	65.66%	111.25%	0.00%	0.00%	0.00%	212,187,591	176.91%	
Pelayanan Administrasi Kependudukan Daerah/Kabupaten (DAK Non Fisik)	-	2,000,906,000	2,162,412,666	-	-	-	-	1,849,168,334	1,983,189,350	-	-	-	0.00%	92.42%	91.71%	0.00%	0.00%	0.00%	3,832,357,684	184.13%	
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)	-	-	-	115,375,000	-	-	-	-	-	108,199,160	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	93.78%	0.00%	0.00%	108,199,160	93.78%	



Uraian Kegiatan dan Program	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	-	-	-	99,810,000	-	-	-	-	-	99,800,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	99.99%	0.00%	0.00%	99,800,000	99.99%	
Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	-	-	-	2,075,361,000	-	-	-	-	-	2,006,790,930	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	96.70%	0.00%	0.00%	2,006,790,930	96.70%	
Pengelolaan Sistem Informasi Adminduk (DAK Non Fisik)	-	-	-	40,500,000	-	-	-	-	-	10,250,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	25.31%	0.00%	0.00%	10,250,000	25.31%	
Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Adminduk (DAK Non Fisik)	-	-	-	76,850,000	-	-	-	-	-	76,754,885	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	99.88%	0.00%	0.00%	76,754,885	99.88%	
Program Pelayanan Pendaftaran Pendudukan	-	-	-	-	3,563,472,000	-	-	-	-	-	3,300,030,421	-	-	-	-	-	-	92.61%	0.00%	-	0.00
Operasional Penunjang Pelaksanaan Penerapan KTP-el	-	-	-	-	367,887,000	-	-	-	-	299,550,361	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.42%	0.00%	299,550,361	81.42%	
Gratis Pengurusan KTP dan KK	-	-	-	-	67,700,000	-	-	-	-	67,700,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	67,700,000	100.00%	
Pelayanan KTP dan KK Keliling	-	-	-	-	48,275,000	-	-	-	-	46,503,225	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.33%	0.00%	46,503,225	96.33%	
Operasional Penunjang Pelaksanaan Penerapan KIA	-	-	-	-	167,100,000	-	-	-	-	165,812,400	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.23%	0.00%	165,812,400	99.23%	
Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	-	-	-	-	780,080,000	-	-	-	-	736,250,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.38%	0.00%	736,250,000	94.38%	
Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik)	-	-	-	-	2,132,430,000	-	-	-	-	1,984,214,435	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.05%	0.00%	1,984,214,435	93.05%	
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	158,150,000	-	-	-	-	156,252,225	-	-	-	-	-	-	-	98.80%	0.00%	-	0.00
Gratis Pengurusan Akta Pencatatan Sipil	-	-	-	-	107,150,000	-	-	-	-	106,150,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.07%	0.00%	106,150,000	99.07%	
Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Keliling	-	-	-	-	51,000,000	-	-	-	-	50,102,225	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.24%	0.00%	50,102,225	98.24%	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	490,310,000	-	-	-	-	470,747,000	-	-	-	-	-	-	-	96.01%	0.00%	-	0.00
Pembangunan dan Operasional SIAK secara terpadu	-	-	-	-	198,549,000	-	-	-	-	191,761,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.58%	0.00%	191,761,000	96.58%	
Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	-	-	-	-	279,511,000	-	-	-	-	278,986,000	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.81%	0.00%	278,986,000	99.81%	
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan/atau Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK Non Fisik)	-	-	-	-	12,250,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00%	
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	-	-	-	-	2,400,000	28,637,379,606	-	-	-	-	2,339,300	-	-	-	-	-	-	97.47%	0.00%	-	0.00
Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	-	-	-	-	2,400,000	-	-	-	-	2,339,300	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.47%	0.00%	2,339,300	97.47%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	-	-	-	8,217,490,725	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	5,156,998,725	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	5,144,998,725	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	443,695,767	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	443,695,767	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1,728,451,865	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	37,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	99,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Facilitasi kunjungan tamu	-	-	-	-	-	813,652,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	13,332,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	36,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	-	-	145,368,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	-	-	67,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	627,044,368	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	37,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	471,044,368	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	119,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	241,300,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00	



Uraian Kegiatan dan Program	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	46,800,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	149,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	-	-	-	658,624,477	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	576,218,824	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	381,396,724	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	194,822,100	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Penataan pendaftaran penduduk	-	-	-	-	-	82,405,653	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	-	-	-	-	-	82,405,653	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-	354,928,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	354,928,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	-	-	-	354,928,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-	-	-	314,750,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	-	-	-	214,750,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	-	-	-	-	-	214,750,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	0.00



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Demikian juga upaya untuk mencari tantangan dan peluang dalam menentukan nilai – nilai strategis yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencapai visi, misi, menentukan arah dan kebijakan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Masih ada masyarakat yang kurang menyadari pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Masih rendahnya tingkat kepedulian sebagian masyarakat terhadap pengembangan program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terasa belum Optimal.
- 4) Masih kurang maksimal pelayanan di masa pandemi COVID-19.

2.4.2. Peluang

Peluang yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;
- 2) Terbentuknya Bank Data Kependudukan yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi bagi lembaga, instansi dan masyarakat yang membutuhkan dengan model IT;



- 3) Adanya dukungan positif dari kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi Administrasi Kependudukan.;
- 4) Adanya regulasi untuk pengurusan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya/gratis;

2.5. Program-Program Strategis

Program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program Pemerintah. Program sebagai penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan, merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun dengan nyata, sistematis, dan terpadu. Adapun program-program dimaksud adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pendaftaran Penduduk
- 3) Program Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur maupun pembukaan wilayah baru di Kabupaten Sinjai selama 5 tahun kedepan akan diikuti pergerakan penduduk, dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan.

Terjadinya pengembangan wilayah yang diikuti pergerakan penduduk, memerlukan pelayanan administrasi kependudukan antara lain meliputi :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
3. Pelayanan KTP elektronik
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA
6. Pelayanan pencatatan kelahiran
7. Pelayanan pencatatan kematian
8. Pelayanan pencatatan perkawinan
9. Pelayanan pencatatan perceraian
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan (analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :



Faktor Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strenght)

Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, tersediannya sumberdaya manusia, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai, demi Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

2. Kelemahan (Weaknees)

- a. Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Masih terdapat pemahaman bahwa administrasi kependudukan tidak penting;
- c. Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- d. Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kepedudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk.

Faktor eksternal, meliputi :

1. Peluang (opportunities)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrsi Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya.

2. Tantangan (Threats)

- a. Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.



- c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan semakin meningkat

3.1. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto :

“ Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ”

Dari pernyataan Visi tersebut dijabarkan dalam Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai - nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yg berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.
4. Terwujudnya pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dari pernyataan Visi dan Misi kepala daerah terpilih diatas maka yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya melaksanakannya **adalah misi ketiga yaitu :**

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi diatas, ditetapkan pernyataan Tujuan yang akan dilakukan, yaitu :

“Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif”

Dari pernyataan Tujuan ini ditetapkan **Sasaran** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

“Meningkatkan Layanan Publik yang Berkualitas, Mudah, Cepat & Bermanfaat untuk Masyarakat”

Dan indikator capaian kinerja yang ditetapkan adalah :

1. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)



2. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
5. Persentase Kepemilikan Akta Kematian

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.2.1. Faktor Pendorong

Dalam melaksanakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa pendorong sebagai berikut :

1. Adanya komitmen seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan ketunggalan data penduduk, sehingga tidak ada lagi data ganda masyarakat antar daerah;
2. Komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga tidak lagi mengalami *offline* sistem;
3. Banyaknya regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang membuka pintu untuk melaksakan inovasi pelayanan, hanya belum diperkuat oleh Undang-undang.

3.2.2. Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor penghambat pelaksanaan kinerja antara lain:

1. Keterbatasan APBD yang menyebabkan tidak dapatnya melakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat, karena dalam setiap inovasi yang membutuhkan Informasi Teknologi juga diiringi oleh kebutuhan alat pendukung;
2. Regulasi yang kurang dapat mengakomodir pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga kurang dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih kurangnya implementasi regulasi administrasi kependudukan dalam pelaksanaan sehari-hari.



3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto selama lima tahun kedepan tidak merencanakan pembangunan fisik skala besar yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan pemanfaatan tata ruang sehingga tidak berimplikasi pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4. Isu-isu Strategis

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto merumuskan tim strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- Penerbitan KIA (Kartu Indentitas Anak) usia 0 s/d 17 Tahun.
- Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis teknologi; sesuai dengan Misi ke-3 dan sasaran ke-1 pada RPJMD Tahun 2021-2026, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil dengan Teknologi Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;



Tabel T-B.35.
PEMETAAN PEMRMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Dukumen Kependudukan	Terhambatnya pencapaian Adminduk	Masyarakat yang selama ini kurang pahamnya masyarakat arti pentingnya Adminduk dalam peruntukannya
2.	Masih kurangnya Cakupan Pelayanan Adminduk	Pencapaian target Kinerja tidak terpenuhi	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti penting Adminduk
3.	Penduduk Rentan	Penduduk / masyarakat tidak bisa memperoleh haknya terhadap kepentingannya di karenakan tidak mempunyai data penduduk	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti penting Adminduk
4.	Sumber Daya Manusia	Terkendala terhadap proses Pelayanan Adminduk	Tidak adanya Bimbingan Teknis / Pelatihan terkait pelayanan prima

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1. Tujuan

Tujuan Sebagai bagian dari OPD Kabupaten Mojokerto dan dalam rangka mencapai misi tersebut di atas, sejumlah tujuan yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Untuk mewujudkan misi ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan*** ,maka ditetapkan tujuan yaitu ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.***

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagaimana diuraikan berikut :

Untuk mewujudkan misi *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan*, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu:

Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ***sasarannya*** adalah ***Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif.***



TABEL TC-25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatkan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,10	81	82	83	84	85	
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	70,5	71	71,5	72	72,5	
	Terwujudnya integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	80,01	81,47	82,17	82,97	83,57	84,27	
	Meningkatkan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	1	Persentase Kepemilikan Dokumen KTP	98%	98%	98,25%	98,5%	98,75%	99%
		2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	98%	98%	98,25%	98,5%	98,75%	99%
		3	Persentase Kepemilikan Dokumen KIA	31%	31%	32%	33%	34%	35%
		4	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran (0-18)	93%	93%	93,5%	94%	94,5%	95%
		5	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kematian	98%	98%	98,5%	99%	99,5%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

5.1.1. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:

1. Integrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan;
2. Pelayanan jemput bola/keliling;



Tabel T-C.26
Tujuan , Sasaran , Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatkan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi	1 Integrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan
			2 Pelayanan jemput bola/keliling



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya (sebagaimana terinci pada lampiran), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut:

- Untuk mewujudkan Misi ” ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan***” dirumuskan program-program:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Program Pendaftaran Penduduk
 - c. Program Pencatatan Sipil
 - d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KABUPATEN MOJOKERTO

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2020	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dispendu kecapil		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.77 (A)	81.47 (A)	8.484.518.725	82.17 (A)	8.659.558.725	82.97 (A)	9.265.718.100	83.57 (A)	9.914.318.000,00	84.27 (A)	#####	84.27 (A)	52.765.928.275					
					Nilai RB	70(B)	70.5(B)		71(BB)		71.5(BB)		72(BB)		72.5(BB)		72.5(BB)						
					Nilai IKM	80,01	81		81		83		84		85		86						
					Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Dokumen	Dokumen	50.000.000	Dokumen	100.000.000	Dokumen	107.000.000	Dokumen	114.490.000,00	Dokumen	122.504.000,00	Dokumen	122.504.000,00	Dokumen	122.504.000,00		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKPDP yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	53.500.000	4 Dokumen	57.245.000,00	4 Dokumen	61.252.000,00	4 Dokumen	61.252.000,00	4 Dokumen	61.252.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang tersusun	8 Laporan	8 Laporan	25.000.000	8 Laporan	50.000.000	8 Laporan	53.500.000	8 Laporan	57.245.000,00	8 Laporan	61.252.000,00	8 Laporan	61.252.000,00	8 Laporan	61.252.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan	13 Laporan	13 Laporan	5.805.998.725	13 Laporan	5.194.998.725	13 Laporan	5.558.648.600	13 Laporan	5.947.754.000,00	13 Laporan	6.364.096.000,00	13 Laporan	6.364.096.000,00	13 Laporan	6.364.096.000,00		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	5.780.998.725	14 Bulan	5.144.998.725	14 Bulan	5.505.148.600	14 Bulan	5.890.509.000,00	14 Bulan	6.302.844.000,00	14 Bulan	6.302.844.000,00	14 Bulan	6.302.844.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	53.500.000	1 Laporan	57.245.000,00	1 Laporan	61.252.000,00	1 Laporan	61.252.000,00	1 Laporan	61.252.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	100%	483.655.767	100%	493.695.767	100%	528.254.500	100%	565.232.000,00	100%	604.798.000,00	100%	604.798.000,00	100%	604.798.000,00		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi		60 stel	39.960.000	60 stel	50.000.000	60 stel	53.500.000	60 stel	57.245.000,00	60 stel	61.252.000,00	60 stel	61.252.000,00	60 stel	61.252.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi		304 Desa	443.695.767	304 Desa	443.695.767	304 Desa	474.754.500	304 Desa	507.987.000,00	304 Desa	543.546.000,00	304 Desa	543.546.000,00	304 Desa	543.546.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto				



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	259.200.000	100%	1.794.819.865	100%	1.849.819.865	100%	1.979.298.000	100%	2.117.848.800	100%	2.266.097.000	100%	2.266.097.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor		1 Paket	99.000.000	1 Paket	913.652.500	1 Paket	938.652.500	1 Paket	1.004.350.000	1 Paket	1.074.654.500,00	1 Paket	1.149.880.000,00	1 Paket	1.149.880.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat		12 Bulan	2.400.000														
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat		12 Bulan	16.500.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	26.750.000	12 Bulan	28.622.500,00	12 Bulan	30.626.000,00	12 Bulan	30.626.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		1 Paket	37.800.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	80.250.000	1 Paket	85.867.500,00	1 Paket	91.878.000,00	1 Paket	91.878.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
				Penyediaan Bahan / Material	Jumlah alat tulis kantor sesuai kebutuhan		1 Paket	67.500.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	107.000.000	1 Paket	114.490.000,00	1 Paket	122.504.000,00	1 Paket	122.504.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah		12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	195.368.000	12 Bulan	195.368.000	12 Bulan	209.043.000	12 Bulan	223.676.000,00	12 Bulan	239.333.000,00	12 Bulan	239.333.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang di jalankan				1 Aplikasi	515.799.365	1 Aplikasi	515.799.365	1 Aplikasi	551.905.000	1 Aplikasi	590.538.300,00	1 Aplikasi	631.876.000,00	1 Aplikasi	631.876.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	156.000.000	100%	651.044.368	100%	661.044.368	100%	707.317.000	100%	756.829.200,00	100%	809.806.000,00	100%	809.806.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening / tagihan telepon listrik dan air yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	119.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	133.750.000	12 Bulan	143.112.500,00	12 Bulan	153.130.000,00	12 Bulan	153.130.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan	3 orang	3 orang	37.000.000	3 orang	531.044.368	3 orang	536.044.368	3 orang	573.567.000	3 orang	613.716.700,00	3 orang	656.676.000,00	3 orang	656.676.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	100%	100%	241.300.000	100%	335.000.000	100%	360.000.000	100%	385.200.000	100%	412.164.000,00	100%	441.015.000,00	100%	441.015.000			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah pajak-pajak kendaraan dinas bermotor yang terbayar,	16 Unit	16 Unit	46.800.000	16 Unit	75.000.000	16 Unit	100.000.000	16 Unit	107.000.000	16 Unit	114.490.000,00	16 Unit	122.504.000,00	16 Unit	122.504.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	149.500.000	1 Kegiatan	210.000.000	1 Kegiatan	210.000.000	1 Kegiatan	224.700.000	1 Kegiatan	240.429.000,00	1 Kegiatan	257.259.000,00	1 Kegiatan	257.259.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
					jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
				Pemeliharaan / Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	53.500.000	12 Bulan	57.245.000,00	12 Bulan	61.252.000,00	12 Bulan	61.252.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen KTP-El	99,58%	98%	1.444.175.100	98%	835.800.000	98,25%	1.060.355.000	98,50%	1.134.579.850	98,75%	1.214.000.300,00	99%	1.298.979.300,00	99%	1.298.979.300			
					Persentase kepemilikan dokumen Kartu Keluarga	100%	98%		98%		98,25%		98,50%		98,75%		99%		99%				
					Persentase kepemilikan dokumen KIA	30,40%	31%		31%		31,25%		32,00%		31,75%		32%		32%				
					Persentase kepemilikan dokumen SKPWNI	100%	98%		98%		98,25%		98,50%		98,75%		99%		99%				



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Data Capaian Tahun	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2020				2020
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
						(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KTP-El	882352 Dokumen	885000 Dokumen	1.333.747.500	885000 Dokumen	760.800.000	946000 Dokumen	805.355.000	1013200 Dokumen	861.729.850	1084000 Dokumen	922.050.800,00	1160000 Dokumen	986.593.300,00	1160000 Dokumen	986.593.300			
					Jumlah kepemilikan dokumen Kartu Keluarga	391682 Dokumen	392000 Dokumen		392000 Dokumen		419000 Dokumen		448000 Dokumen		479000 Dokumen		512900 Dokumen		512900 Dokumen	-			
					Jumlah kepemilikan dokumen SKPWNI	354037 Dokumen	355000 Dokumen		355000 Dokumen		380000 Dokumen		406600 Dokumen		435000 Dokumen		465500 Dokumen		465500 Dokumen	-			
				Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan publik pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilembaga/instansi terkait	25312 Pelayan					30000 Pelayan	100.000.000	32000 Pelayan	107.000.000	32000 Pelayan	114.490.000,00	32000 Pelayan	122.504.300,00	32000 Pelayan	122.504.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Kartu Keluarga dalam 1 tahun	63987 Dokumen	70000 Dokumen	870.247.500	70000 Dokumen	230.000.000	70000 Dokumen	143.355.000	70000 Dokumen	153.389.850	70000 Dokumen	164.127.000,00	70000 Dokumen	175.616.000,00	70000 Dokumen	175.616.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
					Jumlah Penerbitan Dokumen KTP-El dalam 1 tahun	125924 Dokumen	130000 Dokumen		130000 Dokumen		130000 Dokumen		130000 Dokumen		130000 Dokumen	-	130000 Dokumen	-	130000 Dokumen	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
					Jumlah Penerbitan Dokumen SKPWNI	16608 Dokumen	17000 Dokumen		17000 Dokumen		17000 Dokumen		17000 Dokumen		17000 Dokumen	-	17000 Dokumen	-	17000 Dokumen	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	14 Orang	14 Orang	252.000.000	13 Orang	280.800.000	13 Orang	312.000.000	13 Orang	333.840.000	13 Orang	357.208.800,00	13 Orang	382.213.000,00	13 Orang	382.213.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	203864 Pelayan	12 Bulan	211.500.000	225000 Pelayan	250.000.000	225000 Pelayan	250.000.000	225000 Pelayan	267.500.000	225000 Pelayan	286.225.000,00	225000 Pelayan	306.260.000,00	225000 Pelayan	306.260.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026				
						2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah ke-pemilikan dokumen KIA	86557 Dokumen	95500 Dokumen	110.427.600	95500 Dokumen	75.000.000	102200 Dokumen	100.000.000	109000 Dokumen	107.000.000	116630 Dokumen	114.490.000,00	124700 Dokumen	122.504.000,00	124700 Dokumen	122.504.000			
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Penerbitan dokumen KIA	31992 Dokumen	75000 Blanko	110.427.600	35000 Dokumen	75.000.000	37000 Dokumen	100.000.000	37000 Dokumen	107.000.000	37000 Dokumen	114.490.000,00	37000 Dokumen	122.504.000,00	37000 Dokumen	122.504.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Sarana Prasarana Perakaman KTP	5 Paket		-		-	6 Paket	155.000.000	7 Paket	165.850.000	7 Paket	177.459.500,00	8 Paket	189.882.000,00	8 Paket	189.882.000			
				Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah pengadaan alat rekam	2 Paket					1 Paket	155.000.000	1 Paket	165.850.000	1 Paket	177.459.500,00	1 Paket	189.882.000,00	1 Paket	189.882.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto	
				Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	90,59%	93%	1.305.314.800	93%	389.600.000	94%	404.000.000	95,00%	432.280.000	96,00%	462.539.600,00	97,00%	494.917.000,00	97%	494.917.000			
					Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	98%		98%		98,25%		98,50%		98,75%		99,00%		99%				
					Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100%	98%		98%		98,25%		98,50%		98,75%		99,00%		99%				
					Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	100%	98%		98%		98,25%		98,50%		98,75%		99,00%		99%				
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	281820 Dokumen	310000 Dokumen	1.305.314.800	310000 Dokumen	389.600.000	331700 Dokumen	404.000.000	354900 Dokumen	432.280.000	379800 Dokumen	462.539.600,00	406300 Dokumen	494.917.000,00	406300 Dokumen	494.917.000			
					Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	12579 Dokumen	13500 Dokumen		13500 Dokumen		14500 Dokumen		15500 Dokumen		16500 Dokumen		17700 Dokumen		17700 Dokumen				
					Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan	385 Dokumen	750 Dokumen		750 Dokumen		800 Dokumen		860 Dokumen		920 Dokumen		980 Dokumen		980 Dokumen				
					Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	90 Dokumen	95 Dokumen		95 Dokumen		100 Dokumen		110 Dokumen		120 Dokumen		130 Dokumen		130 Dokumen				



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026					2020	
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran dalam 1 tahun	17429	19200	1.197.314.800	19200	260.000.000	19200	260.000.000	19200	278.200.000	19200	297.674.000,00	19200	318.511.000,00	19200	318.511.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto		
					Jumlah Penerbitan Akta Kematian dalam 1 Tahun	3183	3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto			
					Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dalam 1 Tahun	71	80		80		80		80		80		80		80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto			
					Jumlah Penerbitan Akta Perceraian dalam 1 Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto			
					Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	6 Orang	6 Orang	108.000.000	6 Orang	129.600.000	6 Orang	144.000.000	6 Orang	154.080.000	6 Orang	164.865.600,00	6 Orang	176.406.000,00	6 Orang	176.406.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto		
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	96,58%	100%	1.035.675.700	100%	490.000.000	100%	790.000.000	100%	845.300.000	100%	904.471.000,00	100%	967.782.900,00	100%	967.782.900				
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	12	12	214.750.000	12	250.000.000	12	350.000.000	12	374.500.000	12	400.715.000,00	12	428.764.300,00	12	428.764.300				
				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan dan Pengoperasian Jaringan SIAK secara Terpadu	12 Bulan	12 Bulan	214.750.000	12 kali	250.000.000	12 kali	250.000.000	12 kali	267.500.000	12 kali	286.225.000,00	12 kali	306.260.000,00	12 kali	306.260.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD/Lembaga yang melakukan Perjanjian Kerja Sama	30 OPD/Lembaga					100.000.000	30 OPD/Lembaga	107.000.000	30 OPD/Lembaga	114.490.000,00	30 OPD/Lembaga	122.504.300,00	30 OPD/Lembaga	122.504.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto		
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	1 kali	1 kali	820.925.700	1 kali	120.000.000	1 kali	320.000.000	1 kali	342.400.000	1 kali	366.368.000,00	1 kali	392.013.600,00	1 kali	392.013.600			
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD / Lembaga yang memanfaatkan hak akses data administrasi kependudukan	1 OPD/Lembaga		-		-	100.000.000	5 OPD/Lembaga	107.000.000	6 OPD/Lembaga	107.000.000	6 OPD/Lembaga	114.490.000,00	6 OPD/Lembaga	122.504.300,00	6 OPD/Lembaga	122.504.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi	304 Desa	12 Bulan	720.925.700	304 Desa	-	100.000.000	304 Desa	107.000.000	304 Desa	107.000.000	304 Desa	114.490.000,00	304 Desa	122.504.300,00	304 Desa	122.504.300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
				Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Pemataan dan Pemihahan Arsip Dokumen Administrasi Kependudukan	12 Kegiatan	12 Bulan	100.000.000	12 Kegiatan	120.000.000	120.000.000	12 Kegiatan	128.400.000	12 Kegiatan	128.400.000	12 Kegiatan	137.388.000,00	12 Kegiatan	147.005.000,00	12 Kegiatan	147.005.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	-	60 Pegawai	-	60 Pegawai	120.000.000	120.000.000	60 Pegawai	120.000.000	60 Pegawai	128.400.000	60 Pegawai	137.388.000,00	60 Pegawai	147.005.000,00	60 Pegawai	147.005.000		
				Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis	-			2 Kali	120.000.000	120.000.000	2 Kali	120.000.000	2 Kali	128.400.000	2 Kali	137.388.000,00	2 Kali	147.005.000,00	2 Kali	147.005.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kabupaten Mojokerto
TOTAL PAGU								9.618.664.325	10.199.918.725	#####	11.677.877.950	12.495.328.900	13.369.995.200										



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah gambaran yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD ini sebagaimana ditampilkan dalam di bawah ini :

TC - 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	98%	98,25%	98,5%	98,75%	99%	99%
2	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	98%	98%	98,25%	98,5%	98,75%	99%	99%
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	31%	31%	32%	33%	34%	35%	35%
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	93%	93%	93,5%	94%	94,5%	95%	95%
5	Persentase kepemilikan akte Kematian	98%	98%	98,5%	99%	99,5%	100%	100%



BAB VIII PENUTUP

Rencana strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun untuk memberikan gambaran program pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, berupa rencana yang secara bertahap akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Disusunnya Rencana Strategis ini memudahkan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena dengan perencanaan kegiatan yang spesifik, maka lebih mudah menentukan keberhasilan kegiatan berdasarkan pedoman baku mutu untuk tiap instansi pemerintah.

Mojokerto, September 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto



Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671020 198903 1 009



